

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2014

2014

PERKA ANRI NO. 3, BN 2014/NO. 658 THN 2014, 13 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan kearsipan nasional, meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui kegiatan dekonsentrasi dan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang kegiatan pembinaan kearsipan di daerah sebagai pelaksanaan dana dekonsentrasi.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2014.
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014.

